BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban tindak pidana tentang penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP dan pada Pasal 492 KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023).

1. Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online dilihat dari Pasal 378 KUHP yaitu: Terdakwa di pidana penjara dan di bebani membayar biaya perkara
2. Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online dilihat dari Pasal 492 KUHP Nasional yaitu : Terhadap ketentuan Pasal 492 KUHP Nasional menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta. Terhadap beberapa putusan, pidana denda diberikan sesuai pasal 492 yang tertuang dalam kategori V atau sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana arisan online dan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan untuk mencegah dan menangani kasus – kasus tersebut.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana arisan online